

SISTEM INFORMASI KASUS PERADILAN PADA PENGADILAN

NEGRI KUDUS

Edi Prasetyo A12.2009.03560

Program Studi Sistem Informasi – S1 , Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Dian Nuswantoro, Jl.Nakula I No.5-11 Semarang 50131

coxy.cokcok@yahoo.com

ABSTRAK

Kejaksaan Negeri Kudus merupakan salah satu lembaga Pemerintahan yang bekerja dalam bidang hukum. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten yang menangani kasus kriminal, Kejaksaan Negeri Kudus membutuhkan sebuah pendataan untuk tiap berkas perkara yang terjadi. Dalam proses penanganan kasus tentunya terdapat surat perintah yang digunakan untuk meneruskan pendistribusian kasus tersebut kepada pihak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kudus. Pada penelitian ini diangkat sebuah masalah dimana terdapat sebuah sistem yang mampu tiap berkas perkara yang dikemas dalam bentuk aplikasi menggunakan bahasa pemrograman VISUAL BASIC dan MySQL yang mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Untuk Data yang akan ditampilkan disini, diproses melalui sebuah surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kudus untuk menunjuk jaksa yang akan menangani tiap kasus yang terjadi. Adapun verifikasi berkas perkara akan ditampilkan dalam bentuk laporan.

Kata Kunci : Sistem Hukum, Peradilan, Management Pengelolaan Data, Sistem Informasi, Website.

ABSTRACT

Kudus District Attorney is one who works in the field of Indonesia Government is a government agency at the district level who handles criminal cases, District Attorney Kudus need a case file for each data collection that occurs. In the process of handling cases of course there is a warrant that is used to forward the case to the distribution of which has been designated by the Chief State Prosecutor Kudus. In this study raised a problem where there is a system that is able to each case file that is packaged in the form of an application using VISUAL BASIC programming language and MySQL which manages public information properly and efficiently so as to provide access to information services with ease. For data to be displayed here, is processed through a warrant Kudus Chief State Prosecutor to appoint attorneys who will handle each case. The verification akanditampilkan docket in the form of reports.

Keyword : *Law, Justice, Management Data Management, Information Systems, Website*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah yang sangat penting dalam upaya perbaikan system peradilan dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia adalah masalah manajemen. Persoalan manajemen ini biasanya kurang mendapat perhatian serius di kalangan sarjana hukum yang

mendominasi pengelolaan berbagai lembaga-lembaga hukum di tanah air kita. Mulai dari fungsi penyidikan, penuntutan, pembelaan, pengadilan, sampai ke fungsi eksekusi dan pemyarakatan selalu didominasi oleh para sarjana hukum yang tidak begitu terlatih dalam urusan administrasi dan manajemen.

Karena itu, hampir semua lembaga-lembaga hukum di tanah air kita menghadapi persoalan-persoalan administrasi dan manajemen yang kurang responsive dan cenderung ketinggalan zaman dalam menghadapi perkembangan dalam masyarakat yang menuntut akses keadilan (*access to justice*) yang lebih adil dan berkepastian dan pelayanan hukum (*legal service*) yang lebih efisien dan terbuka (Asshiddiqie, 2013).

Tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*) sangat memerlukan ketersediaan berbagai informasi dan data dasar yang lengkap dan mudah diakses, serta media komunikasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, pengadilan harus memanfaatkan jasa teknologi informasi dan komunikasi modern dengan sebaik-baiknya. Keperluan semacam ini, untuk sebagian

memerlukan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pemeriksaan. Akan tetapi sebagian lainnya tidak memerlukan undang-undang sama sekali. (Asshiddiqie, 2013).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan politik.

Setiap Badan Politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi

untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.(Mansyur, 2010).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis ingin mengajukan saran untuk membuat suatu sistem informasi kasus peradilan pada pengadilan negeri kudus. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan pengelolaan pendataan kasus peradilan akan lebih terorganisir, sehingga akan mempermudah proses pencarian kasus peradilan bila di perlukan dan mempermudah proses laporan administrasi serta meningkatkan efisiensi kerja. Untuk menganalisis sistem tersebut maka penulis

mengambil judul “Sistem Informasi Kasus Peradilan pada Pengadilan Negeri Kudus”

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas adalah sebagai berikut :Bagaimana mengelola kasus peradilan agar lebih tersusun dan tersimpan dengan baik dan dapat di peroleh dan diolah dengan lebih mudah apabila data kasus peradilan di perlukan?

1.2 Batasan Masalah

Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki penulis dan untuk membuat penulisan mengarah pada masalah yang pokok, maka perlu adanya batasan-batasan masalah. Adapun batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Menitikberatkan pada pembuatan system informasi kasus peradilan

pada Pengadilan Negeri Kudus.

2. Aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu menyimpan dan mengelola data kasus peradilan Pengadilan Negeri Kudus.
3. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan VB6 dan MySQL database.
4. Dalam laporan tidak membahas mengenai keamanan sistem.

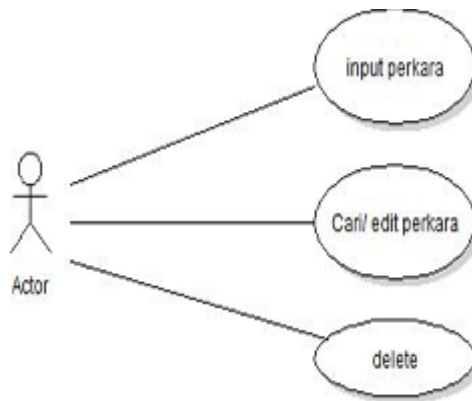
1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak yang akan mengelola dan menyimpan data kasus peradilan pada Pengadilan Negeri Kudus, sehingga apabila data kasus peradilan tersebut di perlukan baik oleh kalangan masyarakat, akademisi maupun dari lembaga lain yang berkepentingan, maka data kasus eradilan tersebut dapat di peroleh dengan mudah dan tersusun dengan baik.

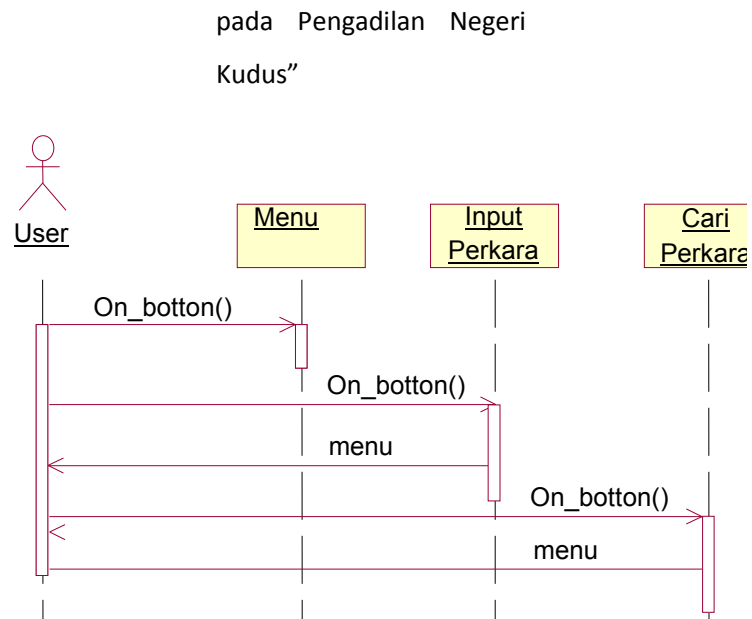
1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

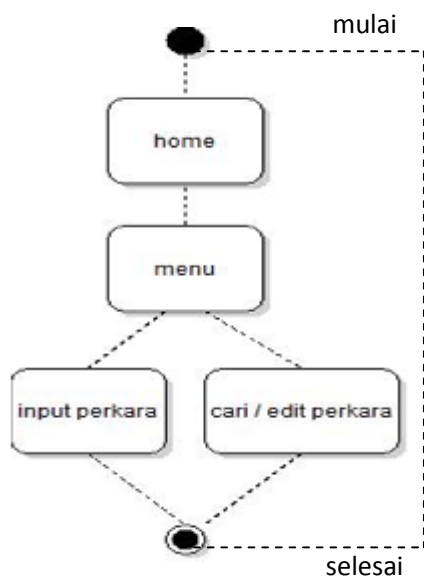
1. Manfaat bagi Pengguna
Pengguna dapat mengelola data kasus peradilan dengan lebih mudah dan tersimpan dengan baik.
2. Manfaat bagi Akademik
Sebagai bahan acuan bagi akademik untuk dijadikan tolak ukur pemahaman dan penguasaan tentang teori yang telah diberikan di bangku kuliah.
3. Manfaat bagi Penulis
 - a. Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah.
 - b. Memberi bekal pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk persiapan dalam menghadapi kerja di masa yang akan datang.



Gambar 4.1 Gambar Use Case diagram View scene “Sistem Informasi Kasus Peradilan pada Pengadilan Negeri Kudus”



Gambar 4.3 : Sequence Diagram “Sistem Informasi Kasus Peradilan pada Pengadilan Negeri Kudus”



Gambar 4.2 Gambar Activity Diagram “Sistem Informasi Kasus Peradilan

v.1 Kesimpulan

1. Sistem peradilan ini dapat mengelola dan menyimpan data kasus peradilan pada Pengadilan Negeri Kudus, Dimana jika di perlukan untuk pengecekan kembali data sebuah kasus maka memudahkan hal tersebut.
2. Data kasus peradilan tersebut di perlukan baik oleh kalangan masyarakat, akademisi maupun dari lembaga lain yang berkepentingan sehingga dengan mudah dpt diperoleh.
3. Aplikasi ini mudah di gunakan oleh karyawan pengadilan negeri Kudus dan

dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu pada pengadilan negeri kudus.

v.2 Saran

- 1) Diharapkan Bagi oknum kejaksaan Negri Kudus Untuk dapat menyediakan SDM khusus untuk melayani system ini demi kelancaran informasi yang dibutuhkan.
- 2) Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan sistem papan informasi digital dalam kejaksaan negeri Kudus.